



Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Daftar Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

I. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

II. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
2. Kepmen LH Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan.
3. Kepka Bapedal Nomor 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.
4. Kepka Bapedal Nomor 299/BAPEDAL/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
5. Kepka Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
6. Kepmen LH Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL.
7. Kepmen LH Nomor 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu.
8. Kepmen LH Nomor 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah.
9. Kepmen LH Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
10. Kepmen LH Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
11. Kepmen LH Nomor 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat.
12. Kepka Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
13. Kepka Bapedal Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
14. Kepmen LH Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
15. Kepmen Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah.
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.
5. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan lindung.
6. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.

IX. Keanekaragaman Hayati

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. Keppres Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika.

X. Peraturan di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
2. Kepmen LH Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas LH dan Pejabat Pengawas LH Daerah.
3. Kepka Bapedal Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LH di Bapedal.
4. Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan LH Bagi Pejabat Pengawas.
5. Kepmen LH Nomor 57 tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas LH di Kementerian Lingkungan Hidup.
6. Kepmen LH Nomor 58 tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas LH di Propinsi/Kabupaten/Kota.
7. Kepmen LH Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) pada Kementerian Lingkungan Hidup.
8. Kepmen LH Nomor 78 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup.
9. Kepmen LH Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup.

XI. Laboratorium

Kepka Bapedal Nomor 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan.

XII. Organisasi dan Kelembagaan

1. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara.

2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara.
3. Keppres RI Nomor 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
4. Peraturan Menteri Negara LH Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Negara LH Nomor 355 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2006
6. Kepmen LH Nomor 178 Tahun 2004 tentang Kurikulum Penyusunan, Penilaian dan Pedoman serta Kriteria Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
7. Kepmen LH Nomor 75 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Laksana Pusat Produksi Bersih Nasional.
8. Kepmen LH Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

XIII. Perjanjian International

1. Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment to The Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Beijing Atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon).
2. Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Montreal Amendment to The Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Montreal Atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon).
3. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Amendment to The Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (Amendemen Atas Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya).
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2005 tentang Pengesahan Framework Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Secretariat of The Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal on The Establishment of A Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for Southeast Asia (Persetujuan Kerangka Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Konvensi Basel Mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya tentang Pembentukan Pusat Regional Konvensi Basel untuk Pelatihan dan Alih Teknologi Bagi Asia Tenggara).

Dipublikasikan oleh :
Asdep Urusan Pengembangan Peraturan
Perundang-undangan dan Perjanjian International
Pada Deputi V MENLH
Bidang Penaatan Lingkungan
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Jl. DI. Panjaitan Kav. 24 Jakarta 13410 - Indonesia
Telp./Fax : 851 7185
Website :<http://www.menlh.go.id>

16. Kepmen Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
17. Kepmen LH Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
18. Kepmen LH Nomor 49 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Ka-Andal).
19. Peraturan Menteri Negara LH Nomor 308 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

III. Pengelolaan Limbah B3

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3.
4. Keppres Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Pengesahan Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal.
5. Kepka Bapedal Nomor 68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengoperasian Alat Pengolah, Pengelolaan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6. Kepka Bapedal Nomor 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
7. Kepka Bapedal Nomor 02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3.
8. Kepka Bapedal Nomor 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3.
9. Kepka Bapedal Nomor 04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3.
10. Kepka Bapedal Nomor 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3.
11. Kepka Bapedal Nomor 255/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.
12. Surat Edaran Kepala Bapedal Nomor 08/SE/02/1997 tentang Penyerahan Minyak Pelumas Bekas.
13. Kepka Bapedal Nomor 02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah.
14. Kepka Bapedal Nomor 03/BAPEDAL/01/1998 tentang Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah B3.
15. Kepka Bapedal Nomor 04/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Prioritas Daerah Tingkat I Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah B3.
16. SK Nomor 128/MENLH/7/2003 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis.

IV. Pengendalian Pencemaran Air

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
2. Kepmen LH Nomor 35/MENLH/7/1995 Tentang Program Kali Bersih (Prokasih).
3. Kepmen LH Nomor 35A/MENLH/7/1995 Tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha dalam Pengendalian Pencemaran di Lingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih).
4. Kepmen LH Nomor 51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
5. Kepmen LH Nomor 52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.
6. Kepmen LH Nomor 58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.
7. Kepmen LH Nomor 42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi.
8. Kepmen LH Nomor 09/MENLH/4/1997 tentang Perubahan Kepmen LH Nomor 42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Serta Panas Bumi.
9. Kepmen LH Nomor 03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri.
10. Kepmen LH Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
11. Kepmen LH Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
12. Kepmen LH Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.
13. Kepmen LH Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air
14. Kepmen LH Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
15. Kepmen LH Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Domestik.
16. Kepmen LH Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara.
17. Kepmen LH Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air.
18. Kepmen LH Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
19. Kepmen LH Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
20. Kepmen LH Nomor 122 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri.
21. Peraturan Menteri Negara LH Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Potong Hewan.

V. Pengendalian Pencemaran Kerusakan Laut

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
2. Kepmen LH Nomor 45/MENLH/11/1996 tentang Program Pantai Lestari.

3. Kepmen LH Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Mutu Kerusakan Terumbu Karang.
4. Kepka Bapedal Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi terumbu Karang.
5. Kepmen LH Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.
6. Kepmen LH Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.
7. Kepmen LH Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.

VI. Pengendalian Pencemaran Udara

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
3. Keppres Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for The Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer As Adjusted and Amended by The Second Meeting of Parties London, 27-29 June 1990.
4. Kepmen LH Nomor Kep-35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
5. Kepmen LH Nomor Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
6. Kepmen LH Nomor Kep-15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru.
7. Kepmen LH Nomor 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan.
8. Kepmen LH Nomor 49/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran.
9. Kepmen LH Nomor 50/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan.
10. Kepka Bapedal Nomor Kep-205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.
11. Kepmen LH Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara.
12. Kepmen LH Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi bagi Kegiatan Industri Pupuk.
13. Kepka Bapedal Nomor Kep-107/BAPEDAL/11/1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan Dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemaran Udara.
14. Kepmen LH Nomor 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
15. Kepmen LH Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang di Produksi (Current Production).

VII. Pengendalian Kerusakan Lingkungan

1. PP Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
2. PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
3. Kepmen LH Nomor 43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Daratan.

VIII. Penataan Ruang

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.